



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJP)
TAHUN 2024**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2025**



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Ucapan puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Semua berkat kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas dari seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya yang telah dengan sinergitas dan kolaborasi bergotong royong mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.



Laporan ini merupakan bentuk gambaran akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada tahun 2024 kepada publik dan kepala daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja atas segala kewenangan yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun 2024 yang dituangkan dalam perubahan perjanjian kinerja perangkat daerah. Tuntutan tahun mendatang penuh dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus diantisipasi dan diatasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang strategis.

Akhirul kalam, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini, dengan iringan do'a dan harapan semoga apa yang telah dilakukan bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya Kabupaten Wajo yang kita cintai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sengkang, 3 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740411 199303 1 002

BAB

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan agar setiap instansi Pemerintah di Kabupaten Wajo, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo sebagai unsur Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo telah bergerak secara berkelanjutan guna mewujudkan percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digitasi di era transformasi digital yang ditandai dengan kecepatan teknologi informasi dan keakuratan serta keamanan informasi yang dapat diakses secara luas kepada masyarakat. Berbagai hal tersebut menuntut ketersediaan informasi, kesiapan teknologi informasi, dukungan data statistik sektoral dan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk saling berkoordinasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

Diperlukan perangkat daerah yang dapat penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya transparan tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan dan publik secara luas. Untuk itu, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan pemerintahan yang terbuka dan pemerintahan yang berbasis elektronik. Pemerintahan yang menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi yang dilakukan berbasis elektronik.

Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pengendalian dan evaluasi bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan perencanaan kerja kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang tugasnya agar pelaksanaan perencanaan kerja lebih optimal;

- b. menyusun kebijakan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. merumuskan sasaran dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kebijakan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina pelaksanaan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengarahkan pelaksanaan kebijakan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan aktivitas Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Diskominfo untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral;
- k. melaporkan pelaksanaan kebijakan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian dan Bidang Statistik Sektoral; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sumber Daya Manusia

2.1. Kondisi Riil Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada bulan Desember 2024 terdapat sebanyak 48 orang aparatur yang terdiri atas 25 orang Aparatur Sipil Negara dan 20 orang Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Kepegawaian Tahun 2024

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN (ORANG)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	9	17	25
2	NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)	8	12	20
JUMLAH		18	27	45

Sumber : Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, 2024.

Tabel 1.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Eselonering Tahun 2024

NO	ESELONERING	JENIS KELAMIN (ORANG)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ESELON II.A (JPT PRATAMA)	1	0	1
2	ESELON III.A (ADMINISTRATOR)	1	0	1
3	ESELON III.B (ADMINISTRATOR)	3	0	3
4	ESELON IV.A (PENGAWAS)	1	2	3
5	FUNGSIONAL	1	9	10
6	PELAKSANA	3	4	7
JUMLAH		10	15	25

Sumber : Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, 2024.

Tabel 1.3. Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN		NON ASN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SMA	1	0	2	2	5
2	DIPLOMA III	0	0	0	1	1
3	SARJANA (S1)	5	7	4	10	26
4	PASCASARJANA (S2)	5	8	1	0	14
JUMLAH		10	15	8	12	46

Sumber : Sub Bidang Umum dan Kepegawaian, 2024

2.2. Kondisi Ideal Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi ideal sumber daya manusia aparatur berdasarkan pertimbangan beban pekerjaan khususnya yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, sesuai analisis masih belum memenuhi jumlah yang ideal. Untuk itu diperlukan tambahan jumlah aparatur sipil negara

dengan kelompok jabatan struktural sebagai pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagai sandiman dan statistik, sebagai berikut.

**Tabel 1.4. Jumlah Ideal Sumber Daya Manusia Aparatur
Menurut Kelompok Jabatan Tahun 2024**

NO	JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	EKSISTING	IDEAL	KEBUTUHAN
1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	5	(4)
	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah		1	(1)
	Pengadministrasian persuratan		1	(1)
	Pengadministrasian umum		1	(1)
	Pengemudi		1	(1)
2	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	3	(2)
	Analisis program perencanaan		1	(1)
	Analisis pelaporan		1	(1)
3	Sub Bagian Keuangan	1	5	(4)
	Bendahara (pengeluaran)		1	(1)
	Bendahara (penerima)		1	(1)
	Pengelola gaji		1	(1)
	Penata laporan keuangan		1	(1)
4.	Penanggungjawab Pengelolaan Opini Publik / Fungsional Pranata Humas	1	17	(16)
	Analisis konten media sosial		12	(12)
	Pengelola pengaduan publik		3	(3)
	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama		1	(1)
5.	Penanggungjawab Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi / Fungsional Pranata Humas	1	4	(3)
	Pengadministrasian data penyajian dan publikasi		1	(1)
	Analisis data dan informasi		1	(1)
	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama		1	(1)
6.	Penanggungjawab Layanan Informasi Publik / Pranata Humas	1	6	(5)
	Analisis berita		2	(2)
	Analisis informasi		2	(2)
	Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama		1	(1)
7.	Penanggungjawab Pengembangan Aplikasi dan E-Government / Pranata Komputer	1	38	(37)
	Pengelola sistem dan jaringan		5	(5)
	Pengelola situs/web		13	(13)
	Pengelola data base		1	(1)
	Pengelola teknologi informasi		17	(17)

NO	JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	EKSISTING	IDEAL	KEBUTUHAN
	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama		1	(1)
8.	Penanggungjawab Infrastruktur, Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengelolaan Data Center / Pranata Komputer	1	16	(15)
	Pengelola instalasi teknologi informasi		13	(13)
	Pengelola sistem dan jaringan		1	(1)
	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama		1	(1)
9.	Penanggungjawab Tata Kelola Persandian/Pranata Komputer	1	14	(13)
	Analisis persandian		2	(2)
	Pranata alat persandian		1	(1)
	Operator sandi dan telekomunikasi		4	(4)
	Operator transmisi sandi		3	(3)
	Analisis persandian		1	(1)
	Pengolah data proses penyensoran		1	(1)
	Fungsional Sandiman Ahli Pertama		1	(1)
10.	Seksi Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral	1	5	(4)
	Analisis data standarisasi/penyelia		2	(2)
	Pengelola data statistik		1	(1)
	Fungsional Statistisi Ahli Pertama		1	(1)
11.	Seksi Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral	1	7	(7)
	Penyuluh statistic		4	(4)
	Analisis kerjasama lintas sektor		2	(2)
	Fungsional Statistisi Ahli Pertama		1	(1)
12.	Seksi Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral	1	8	(3)
	Analisis statistic		1	(1)
	Analisis data dan informasi		1	(1)
	Fungsional Statistisi Ahli Pertama		1	(1)
JUMLAH		12	125	(113)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

3. Sarana dan Prasarana Organisasi

3.1. Kondisi Riil Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada bulan Desember 2022 didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang kerja, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2024

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	RUSAK			
			RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	Gedung Kantor	0	1	0	0	1
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	2	0	1	0	3
3	Komputer PC	11	1	0	1	13
4	Laptop / Notebook	10	0	0	0	10
5	Printer	9	0	0	3	12
6	Faximile	1	0	0	0	1
7	Meja Kerja Eselon	14	0	0	0	14
8	Meja Staf	22	0	0	0	22
9	Kursi Kerja Eselon	14	0	0	0	14
10	Kursi Staf	22	0	0	0	22
11	Kursi Tamu	4	0	0	0	4
10	Almari	4	0	0	0	4
11	Filling Kabinet	2	0	0	0	2
12	Air Conditioner (AC)	10	0	0	0	10
13	Kamera	2	0	0	0	2
14	Drone	2	0	0	0	2
15	White Board	1	0	0	0	1
16	Proyektor	1	0	0	0	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

3.2. Kondisi Ideal Sarana dan Prasarana

Kondisi ideal sarana dan prasarana berdasarkan pertimbangan beban pekerjaan khususnya yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, sesuai analisis masih belum memenuhi jumlah yang ideal. Untuk itu diperlukan tambahan sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 1.6. Jumlah Ideal Sarana dan Prasarana Tahun 2024

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	EKSISTING	IDEAL	KEBUTUHAN
1	Gedung Kantor	1	2	(1)
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	3	4	(1)
3	Komputer PC	11	12	(1)
4	Laptop / Notebook	10	13	(3)
5	Printer	13	13	0
6	Faximile	1	1	0
7	Meja Kerja Eselon	14	14	0
8	Meja Staf	22	34	(12)
9	Kursi Kerja Eselon	14	14	0
10	Kursi Staf	22	50	(28)
11	Kursi Tamu	4	5	(1)
10	Almari	4	8	(4)

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	EKSISTING	IDEAL	KEBUTUHAN
11	Filling Kabinet	2	4	(2)
12	Air Conditioner (AC)	10	10	0
13	Kamera	4	4	0
14	Drone	2	2	0
15	White Board	1	1	0
16	Proyektor	1	1	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

4. Besaran Belanja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) sub kegiatan dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.234.537.436,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai Rp. 2.918.187.836,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.247.566.600,-
- c. Belanja Modal Rp. 18.783.000,-

Untuk lebih jelasnya mengenai belanja menurut jenis rincian belanja, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN 2024			
		ANGGARAN			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.872.187.836	6.297.566.600	18.783.000	9.188.537.436
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.872.187.836	641.317.000	18.783.000	3.532.287.836
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		11.250.000		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		2.000.000		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		1.500.000		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1.250.000		

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN 2024			
		ANGGARAN			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		1.250.000		
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		1.250.000		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2.000.000		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		2.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.872.187.836	8.000.000		2.880.187.836
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.872.187.836			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		2.000.000		
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD		6.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		246.335.700		246.335.700
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		4.996.400		
	Penyediaan peralatan rumah tangga		4.997.900		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		34.763.400		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		201.578.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.783.000	18.783.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			18.783.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		304.145.200		304.145.200
	Penyediaan jasa surat menyurat		32.440.400		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		3.500.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		35.000.000		



No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN 2024			
		ANGGARAN			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		233.204.800		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.586.100		66.586.100
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		24.995.100		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		9.591.000		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		32.000.000		
	Penataan Organisasi		5.000.000		5.000.000
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi		5.000.000		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		3.189.999.900		3.189.999.900
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		3.189.999.900		3.189.999.900
	Monitoring opini dan aspirasi publik		40.689.900		
	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah		24.000.000		
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		2.650.420.000		
	Pelayanan informasi publik		118.285.000		
	Layanan hubungan media		274.890.000		
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik		81.715.000		
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2.396.250.000		2.396.250.000
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		2.131.032.000		2.131.032.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN 2024			
		ANGGARAN			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah		2.131.032.000		
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		265.218.000		265.218.000
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota		13.603.800		
	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah		28.100.000		
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik		223.514.200		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		39.999.700		39.999.700
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		39.999.700		39.999.700
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		9.999.700		
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		18.222.500		
	Membangun metadana statistik sektoral		11.777.500		
	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral		-		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		30.000.000		30.000.000
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		20.000.000		20.000.000
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota		10.000.000		

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN 2024			
		ANGGARAN			
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik		10.000.000		
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota		10.000.000		10.000.000
	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota		10.000.000		

Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Sedangkan alokasi anggaran belanja yang diperuntukkan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 1.8. Anggaran Belanja Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	MENINGKATKAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	2,31 - 2,60		
1	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI	CUKUP INFORMATIF (63,00 - 68,50)	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.733.486.900
				Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	3.733.486.900
				Monitoring opini dan aspirasi publik	60.999.900



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
				Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	18.174.900
				Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	2.995.606.400
				Pelayanan informasi publik	103.637.600
				Layanan hubungan media	487.226.600
				Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	67.841.500
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.145.250.000
				Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	1.694.150.000
				Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	1.694.150.000
				Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	451.100.000
				Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	156.000.000
				Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	28.100.000
				Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	267.000.000

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PEMENUHAN DATA STATISTIK SEKTORAL DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	30,01% - 50,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	40.000.000
				Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	40.000.000
				Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	10.000.000
				Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	18.222.500
				Membangun metadata statistik sektoral	11.777.500
3	MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI	INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)	20,01 - 25,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.000.000
				Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	20.000.000
				Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	10.000.000
				Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	10.000.000



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
				Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	10.000.000
				Operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	10.000.000
JUMLAH I					5.948.736.900
II	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN LAYANAN URUSAN PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	BB (70,01 - 75,00)		
1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGAR AAN URUSAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	89,26%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.353.958.263
				Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.250.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
				Administrasi keuangan perangkat daerah	2.486.105.263
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.482.105.263
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2.000.000
				Administrasi umum perangkat daerah	242.444.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.998.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	4.998.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.000.000



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.022.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	201.426.000
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	215.250.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.250.000
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	329.520.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.250.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.770.000
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	68.199.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.199.000

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000
				Penataan organisasi	1.190.000
				Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1.190.000
JUMLAH II					3.353.958.263
JUMLAH I + II					9.302.695.163

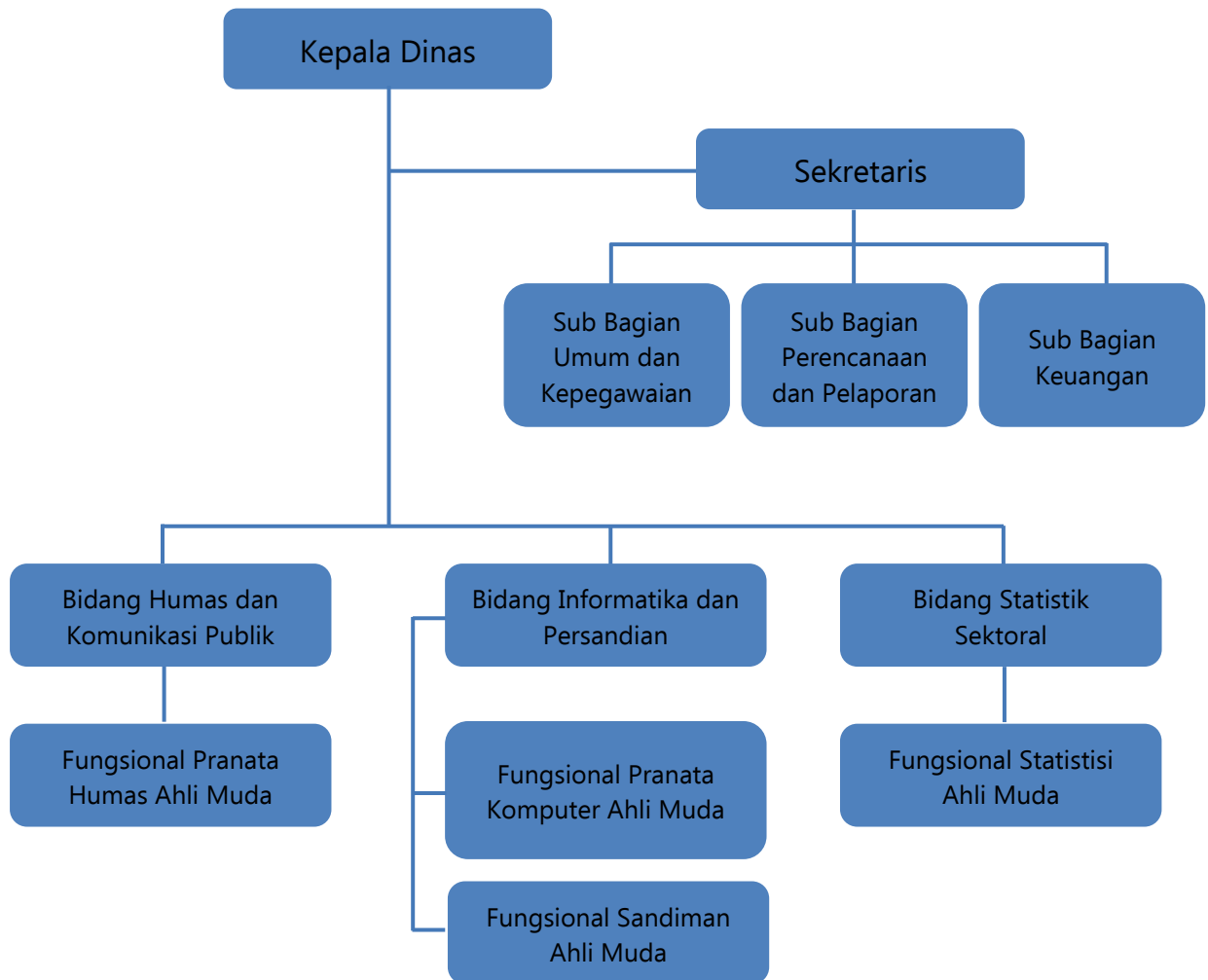
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dengan susunan organisasinya terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik:
 1. Jabatan Fungsional Humas Ahli Muda;
- d. Bidang Informatika dan Persandian :
 1. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda; dan
 2. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda;
- e. Bidang Statistik Sektoral:
 1. Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sedangkan bagan organisasinya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Aspek strategis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, yang menyebutkan:



VISI

PEMERINTAH AMANAH, MENUJU WAJO MAJU DAN SEJAHTERA
Pammase

Sedangkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi.

2. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya.

3. Meningkatkan konektivitas dan Arsitektur dasar daerah yang berwawasan lingkungan.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun Arsitektur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan.

Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sektor unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan mengembangkan usaha sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

MISI

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman

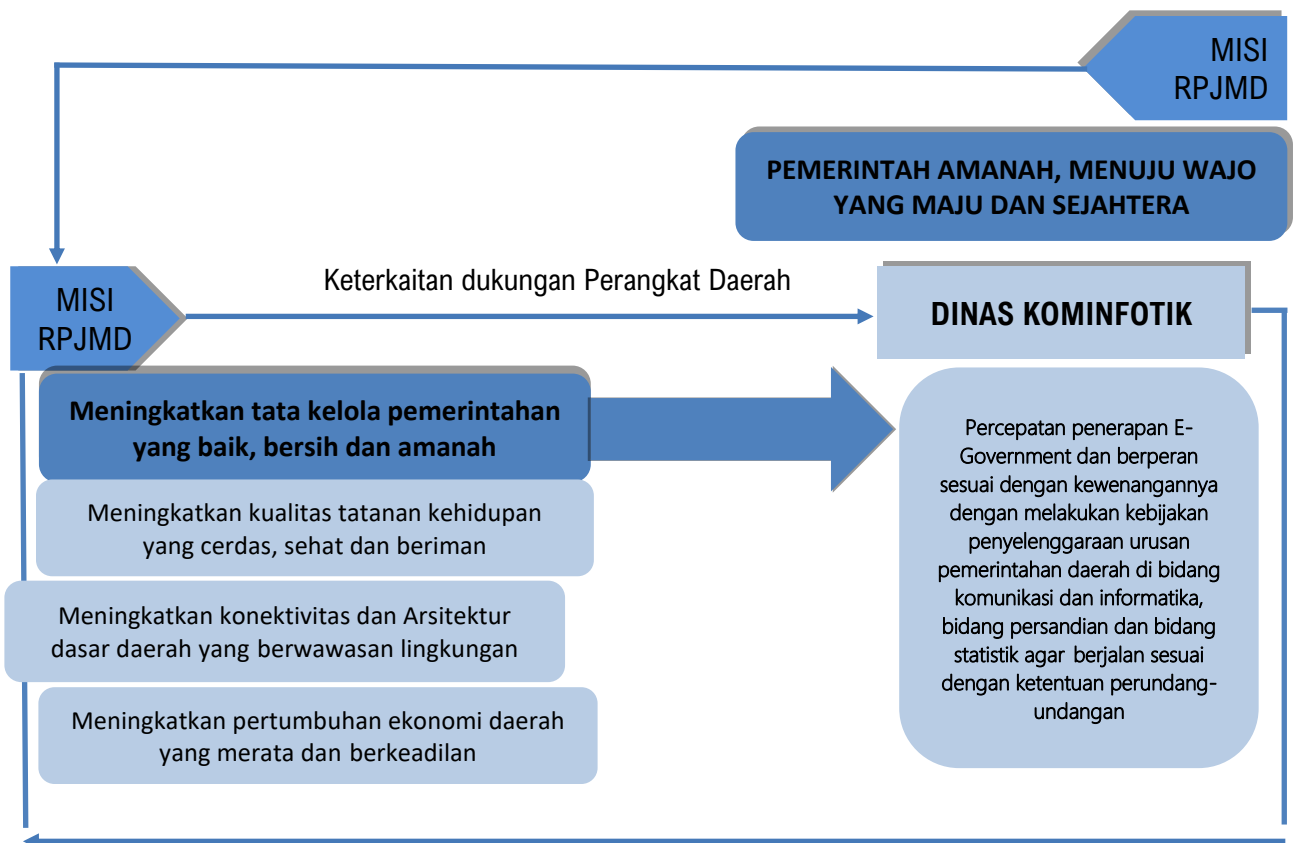
Meningkatkan konektivitas dan Arsitektur dasar daerah yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan



Melihat keempat misi tersebut di atas, **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo** terkait dan mendukung misi ke-1 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah. Dalam mewujudkan tata kelola**

pemerintahan dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan dalam percepatan penerapan e-government sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 1.2. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Wajo dan Renstra Perangkat Daerah

Sedangkan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2019-2024, yang selanjutnya dikenal dengan "**25 Kerja Nyata**" meliputi:

I. Wajo amanah dan bersih

1. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) dan Layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien;
2. Percepatan 8 (delapan) reformasi birokrasi dan E-Government;
3. Zona integritas menuju kawasan bebas korupsi;
4. Memperkuat kelembagaan desa;
5. Meningkatkan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;

II. Wajo sehat, cerdas dan religius

6. Oto dotto;
7. Merevitalisasi sarana kesehatan dan pendidikan;
8. Menyediakan 6 (enam) dokter ahli di rumah sakit;
9. Melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis;

10. 5000 beasiswa Pendidikan bagi siswa berprestasi dan miskin;
11. Meningkatkan insentif tunjangan pegawai syara;
12. Gerakan masjid cantik (Gemantik);
13. Rumah pintar setiap kecamatan;

III. Wajo maju

14. 1000 km jalan kondisi mantap;
15. Area sport setiap kecamatan;
16. 10.000 wirausahawan baru;
17. Satu kecamatan satu produk unggulan;
18. Penataan pasar;
19. Air layak minum 24 jam;

IV. Wajo sejahtera

20. Pertanian terpadu (*integrated farming*);
21. Jaminan harga (resi gudang);
22. Peningkatan pendapatan perkapita 60 juta rupiah;
23. Rumah sehat untuk warga miskin;
24. Kedaulatan pangan (jaringan irigasi baik, ketersediaan pupuk, lahan pertanian berkelanjutan);
25. Bantuan usaha, teknologi dan pemasaran bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, petani, peternak dan nelayan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam mendukung pencapaian 25 kerja nyata diatas, pada kerja nyata ke-2 yaitu percepatan 8 (delapan) reformasi birokrasi dan e-government.

Permasalahan organisasi merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja organisasi yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

1. Permasalahan Internal Organisasi

Masalah internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adalah:

- a. Rendahnya motivasi, disiplin dan budaya kerja aparatur;
- b. Rendahnya kompetensi aparatur;
- c. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas aparatur;
- d. Belum adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur;

- e. Belum optimalnya dan efektifnya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur;
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja;
- g. Terbatasnya jumlah aparatur pelaksana (fungsional umum);
- h. Belum optimalnya jejaring kerja dan koordinasi;
- i. Belum lengkapnya kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Terbatasnya pengelolaan anggaran; dan
- k. Belum terintegrasinya aplikasi dan pusat data center.

2. Permasalahan Eksternal Organisasi

Masalah eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adalah:

- a. Luasnya wilayah pelayanan kinerja;
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang cepat, mudah, murah berbasis digitasi, terintegrasi dan aman;
- c. Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang belum diterbitkannya petunjuk teknisnya;
- d. Tumpangtindihnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan;
- e. Tingginya tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi;
- f. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- g. Masih terdapat wilayah yang tidak dijangkau pembangunan dan pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Tuntutan pemerintah terhadap data center dan pusat satu data yang terintegrasi;
- i. Belum optimalnya pemberdayaan pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat dalam penyampaian informasi;
- j. Belum optimalnya peran produsen data dalam pengumpulan dan analisis data statistik sektoral; dan
- k. Belum optimalnya penyelesaian aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo maka rumusan permasalahan internal dan eksternal di atas, agar memudahkan dalam mengurai permasalahan maka dilakukan pemetaan permasalahan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Untuk lebih jelasnya mengenai masalah pokok, masalah dan akar masalah pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Belum tercipta konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik yang aman	1 Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang cepat, mudah, murah berbasis digitasi, terintegrasi dan aman
			2 Masih terdapat wilayah yang tidak dijangkau pembangunan dan pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi
			3 Tuntutan pemerintah terhadap data center dan pusat satu data yang terintegrasi
			4 Belum terintegrasinya aplikasi dan pusat data center
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi publik secara cepat berbasis elektronik	1 Tingginya tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi
			2 Luasnya wilayah pelayanan kinerja
			3 Belum optimalnya pemberdayaan pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat dalam penyampaian informasi
			4 Belum optimalnya penyelesaian aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR
		Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	1 Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang belum diterbitkannya petunjuk teknisnya
			2 Tumpangtindihnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan
			3 Belum optimalnya peran produsen data dalam pengumpulan dan analisis data statistik sektoral
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan
			2 Rendahnya motivasi, disiplin dan budaya kerja aparatur
			3 Rendahnya kompetensi aparatur
			4 Belum optimalnya inovasi dan kreativitas aparatur
			5 Belum adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja aparatur
			6 Belum optimalnya dan efektifnya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			7 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja
			8 Terbatasnya jumlah aparatur pelaksana (fungsional umum)
			9 Belum optimalnya jejaring kerja dan koordinasi
			10 Belum lengkapnya kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
			11 Terbatasnya pengelolaan anggaran

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, maka Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo dan pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, menyebutkan bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah “**Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera**”, dengan rumusan misinya yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman;



3. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan; dan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai meliputi:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Daerah Termasuk Pemerintah Desa.

Indikator : Indeks reformasi birokrasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas, Kapabilitas Dan Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator : 1. Nilai/predikat SAKIP Kabupaten;

2. Indeks Pelayanan Publik;

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);

4. Skor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran 2 : Meningkatnya Dimensi Pembangunan Desa.

Indikator : Indeks Desa Membangun.

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Manusia.

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia.

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

Indikator : Indeks Pendidikan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Indikator : Indeks Kesehatan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.

Indikator : Rata-rata Pengeluaran Perkapita.

Sasaran 6 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender.

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sasaran 7 : Terpeliharanya Kualitas Berbangsa, Bernegara dan Beragama.

Indikator : Indeks Ketentraman, Ketertiban dan Kerukunan.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Indikator : Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Sasaran 8 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan.

Indikator : 1. Cakupan Daya Saing Infrastruktur.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD).

4. Tujuan 4 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan

Indikator : Ratio Gini

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

- Indikator : 1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. PDRB Perkapita ADHB; dan
3. Indeks Ketahanan Pangan.

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Hidup Lapisan Masyarakat Miskin.

Indikator : Tingkat Kemiskinan.

Sasaran 11 : Berkembangnya Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha.

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah" dengan tujuan 1 adalah "Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dalam pemerintahan daerah" dan sasaran 1 adalah "Meningkatnya akuntabilitas, kapabilitas dan kualitas pelayanan publik".

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah "Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik" dengan indikatornya yaitu "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", dengan sasaran yang terdiri dari:

1. Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik;
2. Meningkatnya penyebarluasan informasi publik secara cepat berbasis elektronik;
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Untuk itulah penjabarannya ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang memuat keterkaitannya dengan bagan alir cascade sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan tahun 2024, disusunlah perencanaan strategis tahunan guna mewujudkan perencanaan strategis jangka menengah dan indicator kinerja utama RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2024**

IKU RPJMD	TARGET RPJMD TAHUN 2024	TUJUAN / SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TUJUAN / SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
1	2	3	4	5
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	31,0	Tujuan : Meningkatkan Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3,01
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,1/BB	Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif 65,00
		Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	75,01%
		Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01
		Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A(80,00)
		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	97,78%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024.

2. Publikasi

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, telah dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website resmi

Dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada bulan Januari 2024, telah mengalami perubahan dengan melakukan penyesuaian disebabkan kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo telah diisi oleh pejabat yang definitif;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang diakibatkan adanya perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran; dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukanlah perubahan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023, yang selanjutnya diturunkan pada perjanjian kinerja 4 (empat) pejabat administrator (eselon III.a maupun III.b) yang berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sekretaris (Eselon III.a);
2. Kepala Bidang Informatika dan Persandian (Eselon III.b);
3. Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik (Eselon III.b); dan
4. Kepala Bidang Statistik Sektoral (Eselon III.b).

Lalu diturunkan lagi pada 3 (tiga) pejabat pengawas (eselon IV.a) yang berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, yaitu:

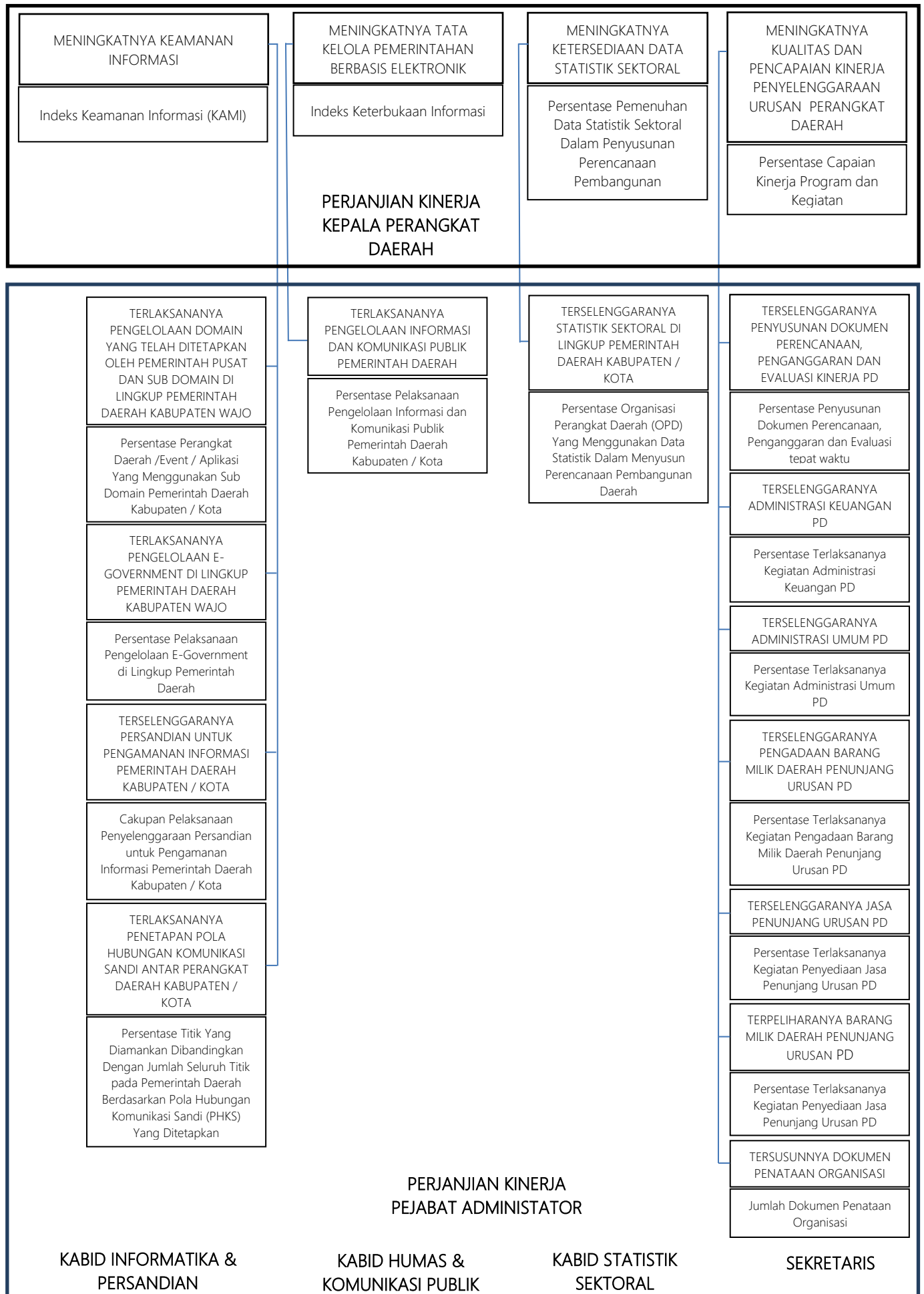
1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran.

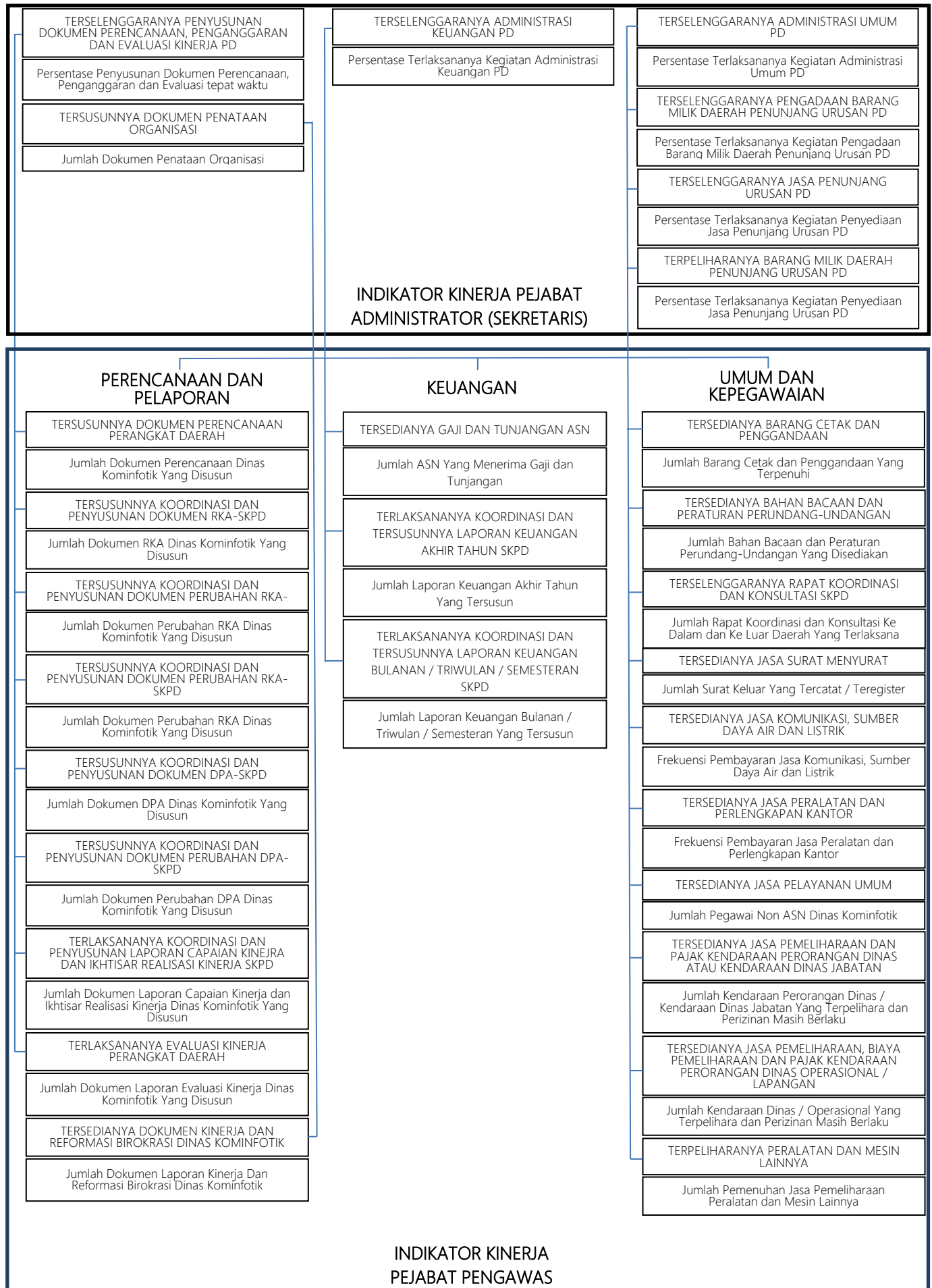
Sinergitas perjanjian kinerja 4 (empat) pejabat administrator terhadap indikator kinerja kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dimana semua indikator kinerja kepala perangkat daerah terbagi ke indikator kinerja pejabat administrator sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian kinerja pejabat administrator dapat dilihat pada lampiran.



Untuk lebih jelasnya mengenai rekapitulasi perjanjian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut disajikan indikator kinerja pejabat administrator yang berkaitan dengan indikator kinerja kepala perangkat daerah.



Gambar 2.3. Cascading Sinergitas Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



Gambar 2.4. Cascading Sinergitas Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas Terhadap Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator

Sehubungan dengan telah dilakukan pengalihan tugas pokok dan fungsi melalui jalur penyetaraan dari beberapa pejabat pengawas yang berada dibawah koordinasi para kepala bidang menjadi pejabat fungsional, sedangkan khusus di lingkup koordinasi sekretariat tetap dalam jabatan pengawas, sebagaimana disajikan perjanjian kinerja pejabat pengawas yang berkaitan dengan perjanjian kinerja administrator, sesuai gambar diatas.

Untuk lebih jelasnya mengenai perjanjian kinerja pejabat pengawas dan fungsional dapat dilihat pada lampiran.

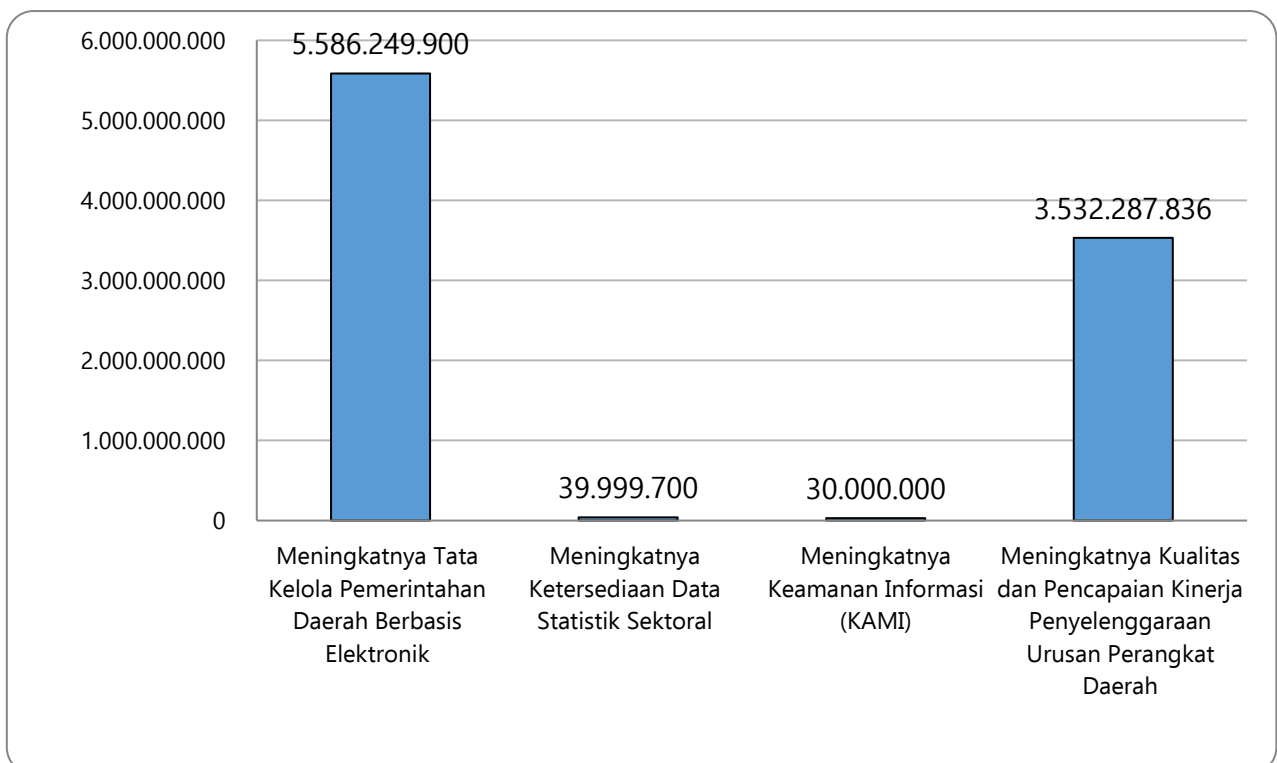
Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu didukung dengan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target serta penanggungjawab sehingga dapat mewujudkan sasaran strategis. Untuk **Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik** dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.586.249.900,00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) penanggungjawabnya Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik dan Bidang Kominikasi dan Informatika. **Sasaran 2. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral** dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 39.999.700,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) penanggungjawabnya Kepala Bidang Statistik Sektoral. **Sasaran 3. Meningkatnya Keamanan Informasi** dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) penanggungjawabnya Kepala Bidang Informatika dan Persandian. **Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah** dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.532.287.836,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) penanggungjawabnya Sekretaris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2. Sasaran Strategis, Anggaran dan Penanggungjawab
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	5.586.249.900	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	39.999.700	Bidang Statistik Sektoral
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	30.000.000	Bidang Informatika dan Persandian
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3,532.287. 836	Sekretariat
Jumlah		9.188.537.436	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024.

Gambaran sasaran strategis dan anggaran pada Perjanjian Kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.5. Sasaran Strategis dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja
di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024**

Untuk lebih jelasnya mengenai rekapitulasi perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.6. REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2024		Jumlah Pagu Tahun 2024		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif 67,00	Cukup Informatif 67,00	3.318.249.900	5.586.249.900	Drs. Dwi Apyranto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1.1.	<i>Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	70%	70%	2.841.999.900	3.189.999.900	Sabri Wahab, S.E., M.A.P	Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik
1.1.1.	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	40.689.900	40.689.900		
1.1.2.	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	24.000.000		
1.1.3.	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	2.333.000.000	2.650.420.000		
1.1.4.	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	152.720.000	118.285.000		



1.1.5.	Terpenuhinya layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	1 Layanan	1 Layanan	234.000.000	274.890.000		
1.1.6.	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	35 Orang	35 Orang	57.590.000	81.715.000		
1.2.	<i>Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo</i>	50%	50%	211.032.000	2.131.032.000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Informatika dan Persandian
1.2.1.	Terselenggaranya sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	39 Unit	39 Unit	211.032.000	2.131.032.000		
1.3.	<i>Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten /kota</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah</i>	50%	50%	265.218.000	265.218.000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Informatika dan Persandian
1.3.1.	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	13.603.800		
1.3.2.	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	1 Unit	1 Unit	28.100.000	28.100.000		

1.3.3.	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	12 Unit	12 Unit	222.118.000	223.514.200		
2	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	75,01%	75,01%	39.999.700	39.999.700	Drs. Dwi Apyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.1.	<i>Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota</i>	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	100%	100%	39.999.700	39.999.700	Murti, S.E., M.A.P.	Kepala Bidang Statistik Sektoral
2.1.1.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen	9.999.700	9.999.700		
2.1.2.	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	39 Orang	39 Orang	18.222.500	18.222.500		
2.1.3.	Terlaksananya pembangunan metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	11.777.500	11.777.500		
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01%	30,01%	30.000.000	30.000.000	Drs. Dwi Apyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

3.1.	<i>Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	<i>Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	55%	55%	20.000.000	20.000.000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Informatika dan Persandian
3.1.1.	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000		
3.1.2.	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000		
3.2.	<i>Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota</i>	<i>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</i>	100%	100%	10.000.000	10.000.000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Informatika dan Persandian
3.2.1.	Terlaksananya operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000		
4	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	97,78%	97,78%	3.212.964.179	3.532.287.836	Drs. Dwi Apyranto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik



4.1.	<i>Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu</i>	100%	100%	11.250.000	11.250.000	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.1.1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000		
4.1.2.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000		
4.1.3.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000		
4.1.4.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000		
4.1.5.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000		
4.1.6.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000		
4.1.7.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000		



4.2.	<i>Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	100%	2.698.864.179	2.880.187.836	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.2.1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	2.694.864.179	2.872.187.836		
4.2.2.	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000		
4.2.3.	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	6.000.000		
4.3.	<i>Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	100%	136.518.300	246.335.700	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.3.1.	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	4.996.400	4.996.400		
4.3.2.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	4.997.900	4.997.900		
4.3.3.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	25.011.000	34.763.400		



4.3.5.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	101.513.000	201.578.000		
4.4.	<i>Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	100%	15.515.400	18.783.000	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.4.1.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit	15.515.400	18.783.000		
4.5.	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	288.224.800	304.145.200	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.5.1.	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	32.440.400		
4.5.2.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	3.500.000		
4.5.3.	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	35.000.000		
4.5.4.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	225.724.800	233.204.800		

4.6.	<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	57.591.500	66.586.100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.6.1.	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit	15.000.500	24.995.100		
4.6.2.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	9.591.000	9.591.000		
4.6.3.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	33.000.000	32.000.000		
4.7.	<i>Tersusunnya dokumen penataan organisasi</i>	<i>Jumlah dokumen penataan organisasi</i>	100%	100%	5.000.000	5.000.000	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris
4.7.1.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000		



BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dengan membentuk tim evaluasi internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 dan untuk tahun 2023 juga telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Evaluasi Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024. Tim evaluasi internal dimaksud bertugas mengumpulkan data dan informasi, melakukan pra evaluasi, memvalidasi dan mengevaluasi serta mengukur sekaligus memberikan gambaran sejauhmana capaian kinerja, gambaran keberhasilan maupun kegagalan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode bahwa apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, melalui rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Skala interval dan kategori kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut.

Tabel 3.1. Interval Nilai Realisasi Kinerja dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja secara mandiri oleh Tim Evaluasi Internal LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dengan melakukan perhitungan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks keterbukaan informasi	Cukup Informatif (67,00)	-	0,00%	Tidak Ada Penilaian / Evaluasi
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	75,01%	100%	133%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01%	42,32%	141%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	97,78%	97,82%	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil evaluasi mandiri Evaluasi Internal LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, 2024

Berdasarkan data di atas, maka capaian **kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024** sebesar **76,00 %** dengan kategori gradasi kinerjanya adalah **“Tinggi”**. Melihat pada ke-4 sasaran strategis yang meliputi 4 indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa terdapat 3 buah yang dinilai **“Sangat Tinggi”** dan 1 buah yang tidak ada capaian disebabkan indeks keterbukaan Informasi tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian seluruh Propinsi Sulawesi Selatan

Apabila dihubungkan dengan setiap sasaran strategis yang didalamnya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik**

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Ket
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif 67,00	Tidak Ada Penilaian/ Evaluasi	0	Drs. Dwi Apyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	<i>Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	70%	70%	100	<i>Sabri Wahab ,S.E., M.A.P</i>	<i>Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik</i>	
	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100			



	Terpenuhinya layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	1 Layanan	1 Layanan	100		
	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	35 Orang	35 Orang	100		
2	<i>Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo</i>	<i>Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo</i>	50%	50%	100	<i>Imran AR., S.Sos., M.Si.</i>	<i>Kepala Bidang Informatika dan Persandian</i>
	Terselenggaranya sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	39 Unit	39 Unit	100		
3	<i>Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah</i>	50%	50%	100	<i>Imran AR., S.Sos., M.Si.</i>	<i>Kepala Bidang Informatika dan Persandian</i>
	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	1 Unit	1 Unit	100		
	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	12 Unit	12 Unit	100		

**Tabel 3.2.2. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral**

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Ket
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	75,01%	75,01%	100%	Drs. Dwi Apryanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	<i>Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota</i>	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	100%	100%	100	<i>Murti, S.E., M.A.P.</i>	<i>Kepala Bidang Statistik Sektoral</i>	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	39 Orang	39 Orang	100			
	Terlaksananya pembangunan metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	100			



Tabel 3.2.3. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Keamanan Informasi

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Ket
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01%	42.32%	141%	Drs. Dwi Apryanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	<i>Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	<i>Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota</i>	55%	55%	100	<i>Imran AR., S.Sos., M.Si.</i>	<i>Kepala Bidang Informatika dan Persandian</i>	
	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100			
2	<i>Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota</i>	<i>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan</i>	100%	100%	100	<i>Imran AR., S.Sos., M.Si.</i>	<i>Kepala Bidang Informatika dan Persandian</i>	
	Terlaksananya operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	100			



**Tabel 3.2.4. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah**

No	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Ket
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	97,78%	97,78%	100,00%	Drs. Dwi Apryanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	<i>Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	100			
2	<i>Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	100			
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100			
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100			
3	<i>Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100			
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100			
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100			
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100			

4	<i>Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100			
5	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100			
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100			
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100			
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100			
6	<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit	100			
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	100			
	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100			

7	<i>Tersusunnya dokumen penataan organisasi</i>	<i>Jumlah dokumen penataan organisasi</i>	100%	100%	100	RATNA YUSUF .,S.Sos.M.I.Kom	Sekretaris	
	Tersedianya dokumen Penigkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100			



2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, terdapat berbagai realisasi kinerja yang mengalami peningkatan seperti indeks keamanan informasi, pemenuhan data statistik sektoral dan indeks keterbukaan informasi, akan tetapi ada juga yang sedikit mengalami penurunan seperti Capaian kinerja program dan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara realisasi dan capaian tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.3. PERBANDINAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Keterangan
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	35,81	40,31%	42,32%	Meningkat
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	41,03	Cukup Informatif (60,30)	-	Tidak Ada Penilaian/Evaluasi
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	84,01	100%	100%	Meningkat
4	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	97,72	97,10%	97,82%	Meningkat

3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perubahan yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melalui Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, dimana setiap tahunnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah telah selaras, sehingga sasaran strategis pada Perubahan Renstra tersinkronisasi dengan Perjanjian Kinerja pada tahun perencanaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

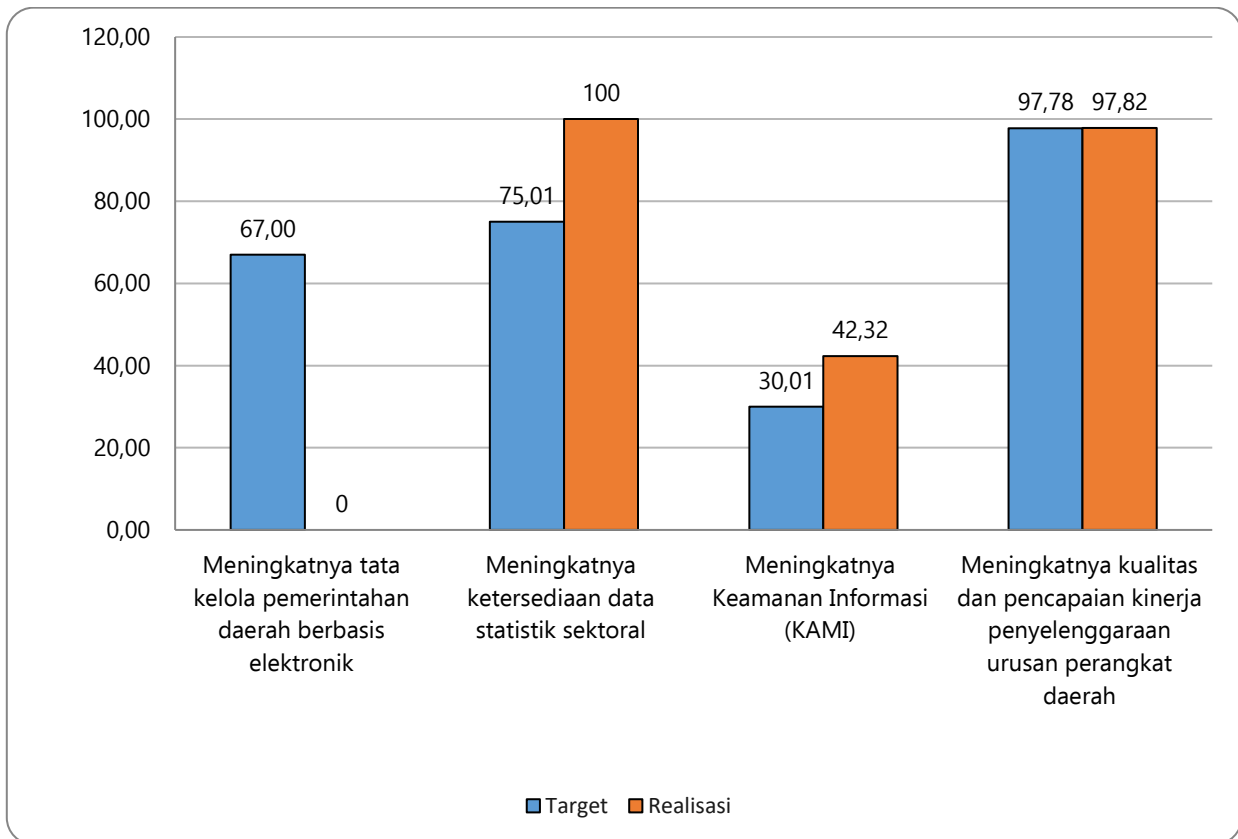
Tabel 3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)	-	Tidak Ada Penilaian /Evaluasi
2	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	75,01 - 100 %	75,01 - 100 %	100%	Tinggi
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01 - 35,00	30,01 - 35,00	42,32%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	97,78%	97,78%	97,82%	Tinggi

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Berdasarkan data di atas, maka capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebesar 76,00% dengan kategori gradasi kinerjanya adalah "Tinggi". Melihat pada ke-4 sasaran strategis yang meliputi 4 indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa terdapat 1 yang dinilai "Sangat Tinggi", 2 yang dinilai "Tinggi". Dan 1 buah yang tidak bernilai Karena tidak ada penilaian pada tahun 2024.

Gambaran perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Perangkat Daerah

4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 apabila dikaitkan dengan lingkungan strategis eksternal berupa penetapan standar nasional, dimana sesuai dengan Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dimana terdapat keselarasan tujuan strategis bukan sasaran strategis khususnya pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar $\geq 2,77$ (Predikat "Baik") di tahun 2024. Untuk sasaran strategis terdapat penyusunan indeks keterbukaan informasi publik dengan indikator indeks keterbukaan informasi publik (pusat) tahun 2024 sebesar 75,65. Sedangkan untuk 3 (tiga) sasaran strategis lainnya dengan indikator yang sejenis tidak terdapat standar nasional. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan realisasi kerja tahun 2024 dengan standar nasional, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun ini
dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2024	Standar Nasional (Jika Ada)	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)	75,65	-	Tidak Ada Penilaian/Evaluasi
2	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	75,01 - 100 %	-	100%	
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01 - 35,00	-	42,32%	
4	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	97,78%	-	97,82%	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

Berdasarkan data di atas, maka capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 belum dilaksanakan sehingga tidak ada nilai dan untuk tahun 2024 target nasional yang ditetapkan sebesar 75,65.

5. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi

Berdasarkan pada tabel 3.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja, pada tahun 2024 yang menunjukkan masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang berpredikat "Tinggi" yaitu Indeks Keterbukaan Informasi yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja lainnya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya kegiatan mencapai sasaran strategis dimaksud mengalami berbagai faktor penyebab baik peningkatan maupun penurunan kinerja, dengan bermacam langkah yang telah dilakukan dan solusi yang diambil, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja	Upaya yang Telah Dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Keterbukaan Informasi	0,00% Tidak Ada Penilaian/ Evaluasi			
2	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	133%	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya Kompilasi data statistik sektoral di semua urusan kewenangan- Data Statistik Sektoral yang disampaikan Oleh Produsen Data belum terukur tingkat validitas dan keakuratannya	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Pusat Data Statistik Sektoral Melalui Aplikasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan- Penginputan Data oleh Produsen Data dilakukan secara Berkala	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan produsen data dan pembina data- Pembinaan kegiatan statistik sektoral melalui pertemuan, rapat dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi oleh Atasan Langsung
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	141%	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya koordinasi dan sinergitas keamanan informasi melalui pengendalian monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan melalui pertemuan atau rapat	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan melalui pertemuan atau rapat
4	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	100%	<ul style="list-style-type: none">- Realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala- pelaksanaan program dan kegiatan melalui pertemuan dengan pelaksana teknis	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan melalui pertemuan dengan pelaksana teknis

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2024

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya baik berupa personil dan anggaran, dimana pada personil dengan keterbatasan jumlah personil mampu dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan pada sisi anggaran yang dikelola sebesar Rp. 9.188.537.436,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.033.127.234,00 atau mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 271.536.995,00 atau sebesar 1.69% dari berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja, efisiensi dimaksud disebabkan beberapa faktor:

1. Adanya e-katalog dalam setiap pembelanjaan yang memungkinkan terjadi selisih harga hingga ada sisa anggaran terdapat diakhir tahun.
2. Belanja untuk koordinasi luar daerah yang menggunakan belanja akomodasi sebesar 30%;

Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Ket
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	0,00%	5.586.249.900	5.518.001.549		Personil 10 Orang Anggaran Rp 68.248.351	
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	133%	39.999.700	35.927.750	89,82	Personil 8 Orang Anggaran Rp 4.071.950	
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	141%	30.000.000	27.271.844	90,91	Personil 8 Orang Anggaran Rp 2.728.156	
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	100%	3.532.287.836	3.451.926.091	97,72	Personil 16 Orang Anggaran Rp 80.361.745	
Jumlah			9.188.537.436	9.033.127.234	98,31	1,69	

7. Analisis Evaluasi Program / Kegiatan

Dalam mewujudkan ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dimana ketercapaian indikatornya telah optimal. Pada **Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik** dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.586.249.900,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Sembilan Ratus Rupiah), yaitu:

1. Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; dan
 - b). Pelayanan Informasi Publik.
- 2). Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.
 - b. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik.

2. Tidak Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; dan
 - b). Pelayanan Informasi Publik.
- 2). Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penataan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota; dan
 - b). Pengelolaan pusat data pemerintah daerah.

Sasaran 2. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 39.999.700,00 (Tiga puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan tujuh Ratus Rupiah) yaitu:

1. Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; dan
 - b). Membangun metadata statistik sektoral.

2. Tidak Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi; dan
 - b). Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral.

Sasaran 3. Meningkatnya Keamanan Informasi dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yaitu:

1. Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik.

2. Tidak Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan:

- a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.532.287.836 00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan puluh Tujuh Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yaitu:

Rupiah) yaitu:

1. Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b). Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - c). Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 - d). Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - e). Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD;
 - f). Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; dan
 - g). Evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
 - b). Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD.
 - c. Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan:
 - a) Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

2. Tidak Terkait Pencapaian Sasaran, adalah:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- b). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
- c). Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - d). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - b). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; dan
 - c). Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Analisis Evaluasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Ket
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks keterbukaan informasi	0%							Tidak Ada Penilaian /Evaluasi
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	133%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Membangun metadata statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	141%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	

4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
						Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
						Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
						Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
						Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
						Evaluasi kinerja perangkat daerah			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
					Penataan Organisasi	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
									Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
									Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	



8. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang setiap tahunnya dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa nilai dan predikat SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 senantiasa mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mendapatkan nilai sebesar 67,54 dengan predikat "B-Baik", di tahun 2020 meningkat menjadi 86,50 dengan predikat "A - Memuaskan" dan di tahun 2021 menurun menjadi 76,55 dengan predikat "BB – Sangat Baik". Pada tahun 2022 meningkat menjadi 85,75 dengan predikat A – Memuaskan. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 85,91 dengan predikat A.

Dalam laporan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2024, ditemui berbagai rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah

No	Rekomendasi Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut yang telah dilakukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja		
a	Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Telah disusun pedoman teknis perencanaan kinerja internal	
b	Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi, sehingga rencana aksi kinerja dapat di monitoring pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasi kegiatan	Telah disusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi	
c	Menyusun Perencanaan Kinerja / <i>Cascading</i> yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)	Telah disusun perencanaan kinerja	
d	Agar setiap pegawai dapat merumuskan sendiri dan menetapkan perencanaan kinerja yang ingin dicapai, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah disampaikan kepada setiap pegawai dalam perencanaan kinerja	

No	Rekomendasi Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut yang telah dilakukan	Keterangan
1	2	3	4
2	Pengukuran Kinerja		
	Agar menyusun rencana/jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi	Telah disusun rencana/jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi	
	Membuat diagram crosscutting sehingga dapat menggambarkan kinerja/aktivitas antara bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan/beririsan secara horizontal sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh.	Telah disusun diagram crosscutting	
3	Pelaporan Kinerja		
	Agar menyusun SOP terkait mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan dan pengukuran data kinerja.	Telah disusun SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	Agar Tim Evaluator Internal lingkup DISKOMINFOTIK untuk mendokumentasikan hasil penilaian akuntabilitas kinerja internal dalam bentuk laporan dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut ditindaklanjuti bidang/unit.	Telah disusun Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang pedoman teknis evaluasi internal, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Tim Evaluator Internal, dan Tim Evaluator telah menyusun laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Belanja

Realisasi anggaran guna mewujudkan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang diimplementasikan melalui realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 telah tercapai sebesar 97,82 %. dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.872.187.836	636.317.000	-	-	-	18.783.000	3.532.287.836	2.828.247.865	600.700.226	-	-	-	18.150.000	3.451.926.091	97,72	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	11.250.000	-	-	-	-	11.250.000	-	11.050.000	-	-	-	-	11.050.000	98,22	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	90,00	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.872.187.836	8.000.000	-	-	-	-	2.880.187.836	2.828.247.865	7.947.100	-	-	-	-	2.836.194.965	98,47	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.187.836	-	-	-	-	-	2.872.187.836	2.828.247.865	-	-	-	-	-	2.828.247.865	98,47	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	5.947.100	-	-	-	-	5.947.100	99,12	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi umum perangkat daerah	-	246.335.700	-	-	-	-	246.335.700	-	228.111.126	-	-	-	-	228.111.126	92,60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	4.996.400	-	-	-	-	4.996.400	-	4.996.400	-	-	-	-	4.996.400	100,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	4.997.900	-	-	-	-	4.997.900	-	4.997.900	-	-	-	-	4.997.900	100,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	34.763.400	-	-	-	-	34.763.400	-	34.160.600	-	-	-	-	34.160.600	98,27	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	201.578.000	-	-	-	-	201.578.000	-	183.956.226	-	-	-	-	183.956.226	91,26	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	18.783.000	18.783.000	-	-	-	-	-	18.150.000	18.150.000	96,63	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	18.783.000	18.783.000	-	-	-	-	-	18.150.000	18.150.000	96,63	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	304.145.200	-	-	-	-	304.145.200	-	290.898.900	-	-	-	-	290.898.900	95,64	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	32.440.400	-	-	-	-	32.440.400	-	32.056.400	-	-	-	-	32.056.400	98,82	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	233.204.800	-	-	-	-	233.204.800	-	220.342.500	-	-	-	-	220.342.500	94,48	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	66.586.100	-	-	-	-	66.586.100	-	62.693.100	-	-	-	-	62.693.100	94,15	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	24.995.100	-	-	-	-	24.995.100	-	24.295.100	-	-	-	-	24.295.100	97,20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	9.591.000	-	-	-	-	9.591.000	-	6.398.000	-	-	-	-	6.398.000	66,71	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	-	32.000.000	-	-	-	-	32.000.000	100,00	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Penataan organisasi	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	4.828.000	-	-	-	-	4.828.000	96,56	
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	4.828.000	-	-	-	-	4.828.000	96,56	
2	Program informasi dan komunikasi publik	-	3.189.999.900	-	-	-	-	3.189.999.900	-	3.151.398.744	-	-	-	-	3.151.398.744	98,79	
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	-	3.189.999.900	-	-	-	-	3.189.999.900	-	3.151.398.744	-	-	-	-	3.151.398.744	98,79	
	Monitoring opini dan aspirasi publik	-	40.689.900	-	-	-	-	40.689.900	-	39.903.170	-	-	-	-	39.903.170	98,07	
	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	-	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	22.413.600	-	-	-	-	22.413.600	93,39	
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	-	2.650.420.000	-	-	-	-	2.650.420.000	-	2.625.174.600	-	-	-	-	2.625.174.600	99,05	
	Pelayanan informasi publik	-	118.285.000	-	-	-	-	118.285.000	-	117.130.400	-	-	-	-	117.130.400	99,02	
	Layanan hubungan media	-	274.890.000	-	-	-	-	274.890.000	-	266.317.965	-	-	-	-	266.317.965	96,88	
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	-	81.715.000	-	-	-	-	81.715.000	-	80.459.009	-	-	-	-	80.459.009	98,46	
3	Program pengelolaan aplikasi informatika	-	2.396.250.000	-	-	-	-	2.396.250.000	-	2.366.602.805	-	-	-	-	2.366.602.805	98,76	
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	-	2.131.032.000	-	-	-	-	2.131.032.000	-	2.112.335.428	-	-	-	-	2.112.335.428	99,12	
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	-	2.131.032.000	-	-	-	-	2.131.032.000	-	2.112.335.428	-	-	-	-	2.112.335.428	99,12	
	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	-	265.218.000	-	-	-	-	265.218.000	-	254.267.377	-	-	-	-	254.267.377	95,87	
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	-	13.603.800	-	-	-	-	13.603.800	-	13.063.300	-	-	-	-	13.063.300	96,03	
	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	-	28.100.000	-	-	-	-	28.100.000	-	28.009.300	-	-	-	-	28.009.300	99,68	
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	-	223.514.200	-	-	-	-	223.514.200	-	213.194.777	-	-	-	-	213.194.777	95,38	



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	-	39.999.700	-	-	-	-	39.999.700	-	35.927.750	-	-	-	-	35.927.750	89,82	
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	-	39.999.700	-	-	-	-	39.999.700	-	35.927.750	-	-	-	-	35.927.750	89,82	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	-	9.999.700	-	-	-	-	9.999.700	-	8.249.000	-	-	-	-	8.249.000	82,49	
	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	-	18.222.500	-	-	-	-	18.222.500	-	16.273.500	-	-	-	-	16.273.500	89,30	
	Membangun metadata statistik sektoral	-	11.777.500	-	-	-	-	11.777.500	-	11.405.250	-	-	-	-	11.405.250	96,84	
5	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	27.271.844	-	-	-	-	27.271.844	90,91	
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	17.898.344	-	-	-	-	17.898.344	89,49	
	Pelaksanaan analisis keutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	8.025.844	-	-	-	-	8.025.844	80,26	
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	9.872.500	-	-	-	-	9.872.500	98,73	
	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	9.373.500	-	-	-	-	9.373.500	93,74	
	Operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	9.373.500	-	-	-	-	9.373.500	93,74	
	Jumlah Pagu Anggaran	2.872.187.836	6.292.566.600	-	-	-	18.783.000	9.188.537.436	2.828.247.865	6.181.901.369	-	-	-	18.150.000	9.033.127.234	98,31	



2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah

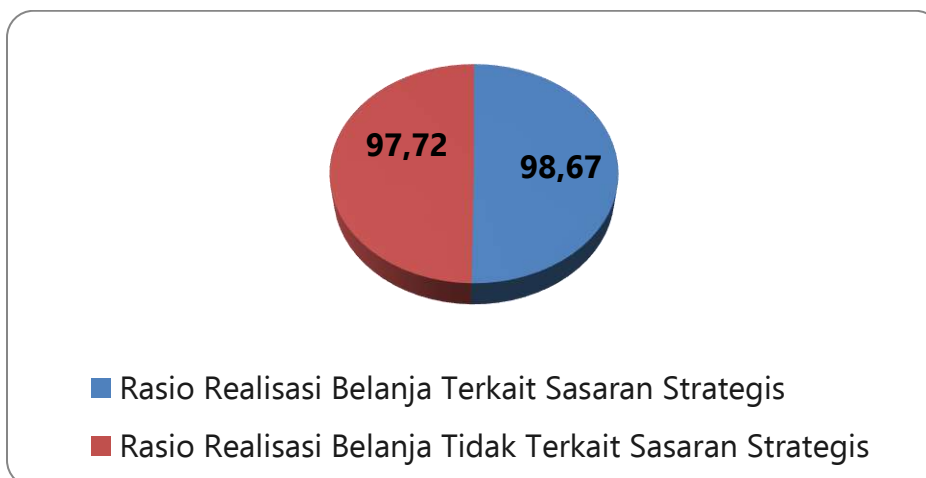
Sasaran kinerja perangkat daerah yang dianggarkan melalui belanja yang diperuntukan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dapat dilihat pada:

- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran strategis dengan anggaran sebesar Rp. 5.680.499.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.605.026.243,- atau sebesar 98,67%
- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran strategis dengan anggaran sebesar Rp. 3.508.037.836,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.428.100.991,- atau sebesar 97,72%

Melihat pada uraian diatas, maka **rasio belanja yang terkait langsung dengan sasaran strategis sebesar 61,82**, dan yang **tidak terkait dengan sasaran strategis sebesar 38,18**. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran rasio belanja dan rasio realisasi belanja terhadap sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah



Gambar 3.3. Rasio Realisasi Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk lebih jelasnya mengenai rasio belanja terhadap sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024		Ket
			Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.189.999.900	3.151.398.744				
		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.189.999.900	3.151.398.744				
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	40.689.900	39.903.170				
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	24.000.000	22.413.600				
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.650.420.000	2.625.174.600				
		Pelayanan Informasi Publik	118.285.000	117.130.400				
		Layanan Hubungan Media	274.890.000	266.317.965				
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	81.715.000	80.459.009				
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI	2.396.250.000	2.366.602.805				
		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.131.032.000	2.112.335.428				
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.131.032.000	2.112.335.428				
		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	265.218.000	254.267.377				
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.603.800	13.063.300				
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	28.100.000	28.009.300				
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	223.514.200	213.194.777				



No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024		Ket
			Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	39.999.700	35.927.750				
		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	39.999.700	35.927.750				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9.999.700	8.249.000				
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18.222.500	16.273.500				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11.777.500	11.405.250				
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.000.000	27.271.844				
		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	20.000.000	17.898.344				
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000	8.025.844				
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.000.000	9.872.500				
		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000	9.373.500				
		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.373.500				



No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024		Ket
			Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.250.000	23.825.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.508.037.836	3.428.100.991	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.250.000	11.050.000	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.872.187.836	2.828.247.865	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.187.836	2.828.247.865	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	246.335.700	228.111.126	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.000	1.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.996.400	4.996.400	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000	1.250.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.900	4.997.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000	1.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.763.400	34.160.600	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.578.000	183.956.226	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.800.000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18.783.000	18.150.000	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.000.000	7.947.100	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	18.783.000	18.150.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	304.145.200	290.898.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.000.000	5.947.100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.440.400	32.056.400	
		PENATAAN ORGANISASI	5.000.000	4.828.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000	3.500.000	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5.000.000	4.828.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.204.800	220.342.500	
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.586.100	62.693.100	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.995.100	24.295.100	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.591.000	6.398.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	32.000.000	
		Jumlah	5.680.499.600	5.605.026.243	Jumlah	3.508.037.836	3.428.100.991	



3. Rasio Belanja terhadap Sasaran RPJMD

Sasaran strategis RPJMD Kabupaten Wajo yang dianggarkan melalui belanja yang diperuntukan untuk pencapaian setiap sasaran strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat dilihat pada:

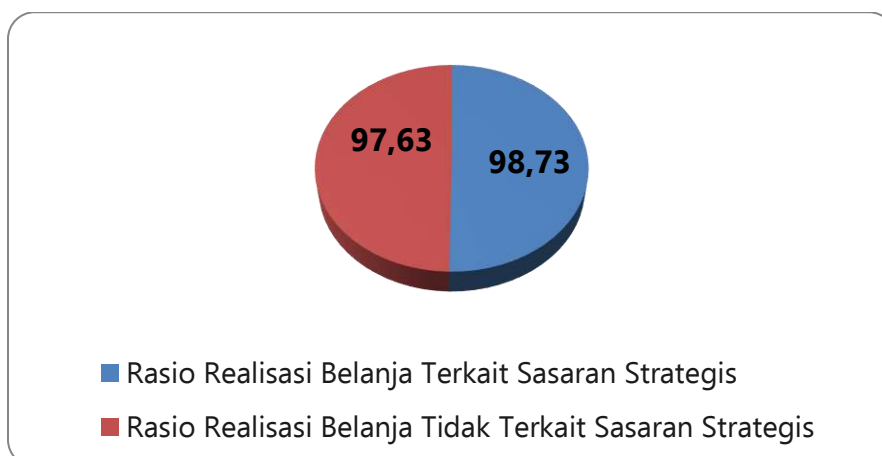
- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Wajo dengan anggaran sebesar Rp. 5.640.499.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.569.098.493,- atau sebesar 98,73%.
- Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Wajo dengan anggaran sebesar Rp. 3.548.037.536,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.464.028.741,- atau sebesar 97,63%.

Melihat pada uraian diatas, maka **rasio belanja yang terkait langsung dengan sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Wajo sebesar 61,39**, dan yang **tidak terkait dengan sasaran strategis sebesar 38,61**.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran rasio belanja dan rasio realisasi belanja terhadap sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Wajo di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPJMD



Gambar 3.4. Rasio Realisasi Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPJMD

Untuk lebih jelasnya mengenai rasio belanja terhadap sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Wajo 2019-2024

No	Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2024		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2024		Ket
			Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Kapabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.189.999.900	3.151.398.744				
		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.189.999.900	3.151.398.744				
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	40.689.900	39.903.170				
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	24.000.000	22.413.600				
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.650.420.000	2.625.174.600				
		Pelayanan Informasi Publik	118.285.000	117.130.400				
		Layanan Hubungan Media	274.890.000	266.317.965				
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	81.715.000	80.459.009				
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI	2.396.250.000	2.366.602.805				
		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.131.032.000	2.112.335.428				
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.131.032.000	2.112.335.428				
		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	265.218.000	254.267.377				
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.603.800	13.063.300				
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	28.100.000	28.009.300				
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	223.514.200	213.194.777				



No	Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2024		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2024		Ket
			Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.000.000	27.271.844	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	39.999.700	35.927.750	
		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	20.000.000	17.898.344	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	39.999.700	35.927.750	
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000	8.025.844	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9.999.700	8.249.000	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.000.000	9.872.500	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	18.222.500	16.273.500	
		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000	9.373.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	11.777.500	11.405.250	
		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.373.500				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.250.000	23.825.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.508.037.843	3.428.100.999	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.250.000	11.050.000	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.872.187.836	2.828.247.865	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.187.836	2.828.247.865	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	246.335.707	228.111.134	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.250.000	1.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.996.400	4.996.400	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000	1.250.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.900	4.997.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.250.000	1.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.763.400	34.160.600	



No	Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2024		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2024		Ket
			Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.578.000	183.956.226	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.800.000				
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.000.000	7.947.100	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	18.783.000	18.150.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	18.783.000	18.150.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.000.000	5.947.100	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	304.145.200	290.898.900	
		PENATAAN ORGANISASI	5.000.000	4.828.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.440.400	32.056.400	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5.000.000	4.828.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000	3.500.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.204.800	220.342.500	
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.586.100	62.693.100	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.995.100	24.295.100	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.591.000	6.398.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	32.000.000	
		Jumlah	5.640.499.900	5.569.098.493	Jumlah	3.548.037.543	3.464.028.749	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Insatansi Pemerintah (LKPIJ) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Penyelenggaraan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggungjawab kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Setiap keberhasilan yang telah dicapai selama ini sebagai bentuk wujud kerja keras, Kerjasama, dan kerja ikhlas dari berbagai pihak. Akan tetapi untuk kegagalan atas pencapaian target yang belum tercapai hendaknya dilakukan antisipasi, perbaikan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai pencapaian tahun pelaporan . Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebesar **75.00%** dengan kategori gradasi kinerjanya adalah "tinggi". Melihat pada ke-4 sasaran strategis yang meliputi 4 indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa terdapat 2 buah yang dinilai "sangat tinggi", dan 1 buah yang dinilai "Tinggi" serta 1 buah indikator kinerja yang tidak bernilai dikarena tahun 2024 propinsi Sulawesi selatan yang Sedangkan ditinjau dari penyerapan belanja langsung sebesar 97,08% dengan kategori kinerja "tinggi".

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 yang optimal didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sinergitas dan koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pembinaan dari atasan langsung secara intensif; dan
3. Monitoring dan evaluasi perkembangan pencapaian target secara berkala

B. Saran

Melihat masih terdapat indikator sasaran strategis yang belum tercapai dan perlu mempertahankan serta meningkatkan indikator lainnya agar lebih baik ke depan, sehingga disarankan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan *choaching clinic*;
2. Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah, pakar, ahli dan perguruan tinggi dalam pengembangan aplikasi layanan publik dan aplikasi manajemen pemerintahan; dan
3. Memberikan *punishment and reward* terhadap aparatur yang berkinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan serta bahan penilaian evaluasi kinerja



Lampiran

Perjanjian Kinerja 2024



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Bupati Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

Pihak Pertama,


Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

A. Lampiran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (67,00 - 68,50)
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	75,01 - 100 %
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01 - 35,00 %
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	97,78%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.212.964.179,-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.841.999.900,-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 476.250.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 39.999.700,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.000.000,-
	Jumlah	Rp. 6.601.213.779,-

Sengkang, 5 Januari 2024

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

B. Lampiran II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi	70%
2	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	50%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	20,77%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.212.964.179,-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.841.999.900,-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 476.250.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 39.999.700,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.000.000,-
	Jumlah	Rp. 6.601.213.779,-

Sengkang, 5 Januari 2024

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA YUSUF, S.Sos.,M.I.Kom.**

Jabatan : Sekretaris
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

RATNA YUSUF, S.Sos.,M.I.Kom
NIP. 19731206 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	97,78%
1	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%
4	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
7	Tersusunnya dokumen penataan organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.250.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.698.864.179,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 136.518.300,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 15.515.400,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 288.224.800,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 57.591.500,-
7.	Penataan Organisasi	Rp. 5.000.000,-
	Jumlah	Rp. 3.212.964.179,-

Sengkang, 5 Januari 2024

Kepala Dinas
 Komunikasi, Informatika Dan Statistik
 Kabupaten Wajo,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19740411 199303 1 002

Sekretaris
 Dinas Komunikasi, Informatika dan
 Statistik Kabupaten Wajo,

RATNA YUSUF, S.Sos., M.I.Kom
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP. 19731206 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURTI, S.E., M.A.P.**
Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektor
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

MURTI, S.E., M.A.P.
NIP. 19760421 200701 2 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	75,01 - 100%
1	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.999.700
	Jumlah	Rp. 39.999.700

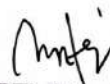
Sengkang, 5 Januari 2024

Kepala Dinas
 Komunikasi, Informatika Dan Statistik
 Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Statistik Sektoral
 Dinas Komunikasi, Informatika dan
 Statistik Kabupaten Wajo,



MURTI, S.E., M.A.P.
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19760421 200701 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMRAN, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Informatika dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

IMRAN AR., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741125 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (67,00 – 68,50)
	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,01- 35,00
1	Terpeliharanya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota	50%
2	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah	50%
3	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	55%
4	Terselenggaranya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 211.032.000,-
2.	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 265.218.000,-
3.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 20.000.000,-
4.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.000.000,-
	Jumlah	Rp. 506.250.000,-

Sengkang, 5 Januari 2024

Kepala Dinas
 Komunikasi, Informatika Dan Statistik
 Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Informatika dan
 Persandian Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo,



IMRAN, S.Sos., M.Si.
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19741125 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id

Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SABRI WAHAB, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 2 Februari 2024

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

SABRI WAHAB, S.E., M.A.P.
NIP. 19781014 200801 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG HUMAS DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pemerintahan Elektronik	Tata Kelola Daerah Berbasis	Indeks Keterbukaan Informasi
			Cukup Informatif (67,00 – 68,50)
1	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	70%


No. Kegiatan

Anggaran

1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.841.999.900,-
	Jumlah	Rp. 2.841.999.900,-

Sengkang, 1 Februari 2024

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Humas dan Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,



SABRI WAHAP, S.E., M.A.P
Pangkat : Pembina
NIP. 19781014 200801 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAFARUDDIN, S.STP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

SAFARUDDIN, S.STP., M.Si.
NIP. 19900507 201206 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG HUMAS DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pemerintahan Elektronik	Tata Daerah	Kelola Berbasis
		Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (67,00 – 68,50)
1	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	70%

No. Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah

Rp. 2.841.999.900,-

Rp. 2.841.999.900,-

Sengkang, 5 Januari 2024

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Humas dan Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,



SAFARUDDIN, S.STP., M.Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19800518 200701 1 011